

## Mandat (*credential*) dalam budaya mitigasi bencana pada masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang

Cahyo Septianto Hutomo<sup>ID</sup>, Agus Suharjono Ekomadyo\*<sup>ID</sup>, Muchi Juma Ameir

Program Studi Magister Arsitektur, SAPPK, Institut Teknologi Bandung  
Jl. Tamansari 64, Bandung 40116, Jawa Barat, Indonesia



CrossMark

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i> Received Dec. 02, 2019 Received in revised form Dec. 06, 2019 Accepted January 13, 2020 Available online April 01, 2020</p> <hr/> <p><i>Keywords:</i> Adaptive capacity Culture of mitigation Local wisdom Sindang Barang</p> <hr/> <p>*Corresponding author: Agus Suharjono Ekomadyo Kelompok Keahlian Perancangan Arsitektur, SAPPK, Institut Teknologi Bandung, Indonesia Email: <a href="mailto:aekomadyo00@gmail.com">aekomadyo00@gmail.com</a> ORCID: <a href="https://orcid.org/0000-0002-6124-6886">https://orcid.org/0000-0002-6124-6886</a></p>	<p><b>Mandate (<i>credential</i>) as mitigation culture on local community of Sindang Barang</b></p> <p>Local wisdom can be learned through discovery of physical elements of traditional villages, such as spatial layout, architectural objects, and daily activities. The organization prevailing in environment plays an important role in managing a contextual mitigation culture. The co-existence of authority (mandate) masters have the authority of value/cultural capital and to create symbolic elements, such as will or belief. Sindang Barang Cultural Village was taken as a case study to reveal the history and role of the mandate in the culture of disaster mitigation. This study aims to observe the role of the mandate and its impact in disaster mitigation. The role of the mandate is also examined to see the existence of efforts to preserve the values of local wisdom towards the times. This research uses descriptive-qualitative method by tracing the phenomena and artifacts in the field. The analysis carried out in two phases. The first phase is to create a mitigation concept table based on the existing program or artifacts. The second phase is to discuss the mitigation culture based on its classified capacities. The mitigation seen from the Sindang Barang Cultural Village program and artifacts is the risk of fire, earthquake, and landslide. The process of determining a mandate is commensurate with adaptive capacity because this stage tends to lead to restriction or orders about in program that is carried out systematically in particular context.</p>

### Pendahuluan

Pandangan akan keselarasan antara lingkungan binaan dan lingkungan alam pada masyarakat adat merupakan khazanah budaya yang bisa dipelajari, termasuk dalam mempelajari budaya mitigasi (*mitigation culture*). Budaya mitigasi bencana alam dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman kebencanaan yang berlangsung secara terus menerus. Kearifan lokal dapat dipelajari melalui penelusuran terhadap kampung adat secara fisik pada tata ruang kawasan, bentuk arsitektur, dan aktivitas sehari-hari (Madiasworo 2009; Lake et

al. 2018) serta tektonika arsitektur tradisional yang diwariskan secara turun temurun (Lake 2015).

Diskursus yang berkaitan dengan manajemen risiko kebencanaan masyarakat adat mulai membahas upaya adaptasi dan konservasinya terhadap perkembangan jaman. Sementara, bencana tersendiri membahayakan masyarakat yang tidak mengerti nilai kearifan lokal terdahulu yang seharusnya dilestarikan. Upaya ini muncul dalam bentuk nilai sosial, tradisi, dan keterikatan yang baik terhadap lingkungan (Krüger et al. 2015; Salura dan Lake 2014). Pengalaman menghadapi bencana alam diakumulasi menjadi

pengetahuan mitigasi seperti membentuk tradisi hingga kemampuan memprediksi datangnya bencana alam secara lokal pada konteks tertentu (Permana, Nasution, dan Gunawijaya 2011). Menurut Haggett (1991); Birkmann (2012), proses kultural ini memiliki irisan pengetahuan terhadap proses ilmiah, namun cukup sulit untuk mensosialisasikannya (Birkmann, Chang Seng, dan Setiadi 2013).

Organisasi yang berlaku dalam sebuah lingkungan menjadi faktor penting dalam mengelola budaya mitigasi yang kontekstual. Cannon (2008) membuat skema peranan wewenang (*power*) dalam sebuah sistem pemerintahan (*governance*) beserta distribusi jaminan proteksi bencana yang diberikan kepada masyarakatnya. Urusan tata kelola ini juga menyangkut modal budaya (*cultural capital*) yang dimiliki masyarakat. Modal ini secara umum terdiri atas empat proses natural, yaitu: (1) pengetahuan (*knowledge*), (2) keterampilan (*skill*), (3) tata krama (*manner*), dan (4) mandat (*credential*) (Bourdieu 1986; Dovey 2009). Adanya wewenang (mandat) dapat menguasai nilai/modal kultural dan menciptakan unsur simbolis seperti kepercayaan atau keyakinan (Bourdieu 1986). Menurut Bourdieu, kepercayaan atau keyakinan tersebut belum tentu merepresentasikan adanya wewenang (mandat) sebagai nilai politik secara konkret, tetapi lebih kepada ekspresi atas kuatnya budaya tersebut (Bourdieu 1986; Swartz 1998).

Mengacu pada paparan sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengamati adanya peran mandat (*credential*) beserta dampaknya dalam mitigasi bencana. Peran mandat juga ditelaah untuk melihat adanya upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal terhadap perkembangan jaman. Untuk mencapai tujuan ini, digunakan pendekatan membaca proses kultural (Dovey 2009) sebagai modal budaya (*cultural capital*) dalam mengelola mitigasi bencana alam. Membaca budaya mitigasi bencana pada masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam melakukan inovasi terhadap penanggulangan bencana yang bersifat kultural (Thomalla, Smith, dan Schipper 2015).

## Metode penelitian

Mempelajari budaya mitigasi masyarakat adat dilakukan dengan membaca struktur sosio-kultural (Sabri 2004). Budaya mitigasi ini

ditemukan dalam sejumlah masyarakat adat di Jawa Barat dan Banten, seperti masyarakat adat Kasepuhan di Desa Kanekes (Baduy) (Permana, Nasution, dan Gunawijaya 2011; Suparmini, Setyawati, dan Sumunar 2014), Kampung Ciptagelar (Maryani dan Yani 2014), Kampung Naga (Maryani dan Yani 2014), Kampung Budaya Sindang Barang (Dahlan 2009), dan lainnya. Secara umum, masyarakat adat memiliki status sosio-kultural yang berperan aktif dalam mengelola aktivitas di kampungnya (Harun 2011). Dalam masyarakat adat di Kanekes, *puun* berperan sebagai pengatur adat dan budaya yang kontekstual. Adat ini dikenal sebagai *buyut* dan *pikukuh karuhun* yang bersifat seperti mandat lokal dalam urusan pelestarian lingkungan hidup. *Puun* sendiri merupakan pemimpin yang menyangand gelarnya dari hidup sampai mati dan tidak boleh meninggalkan kampungnya (Suparmini, Setyawati, dan Sumunar 2014).

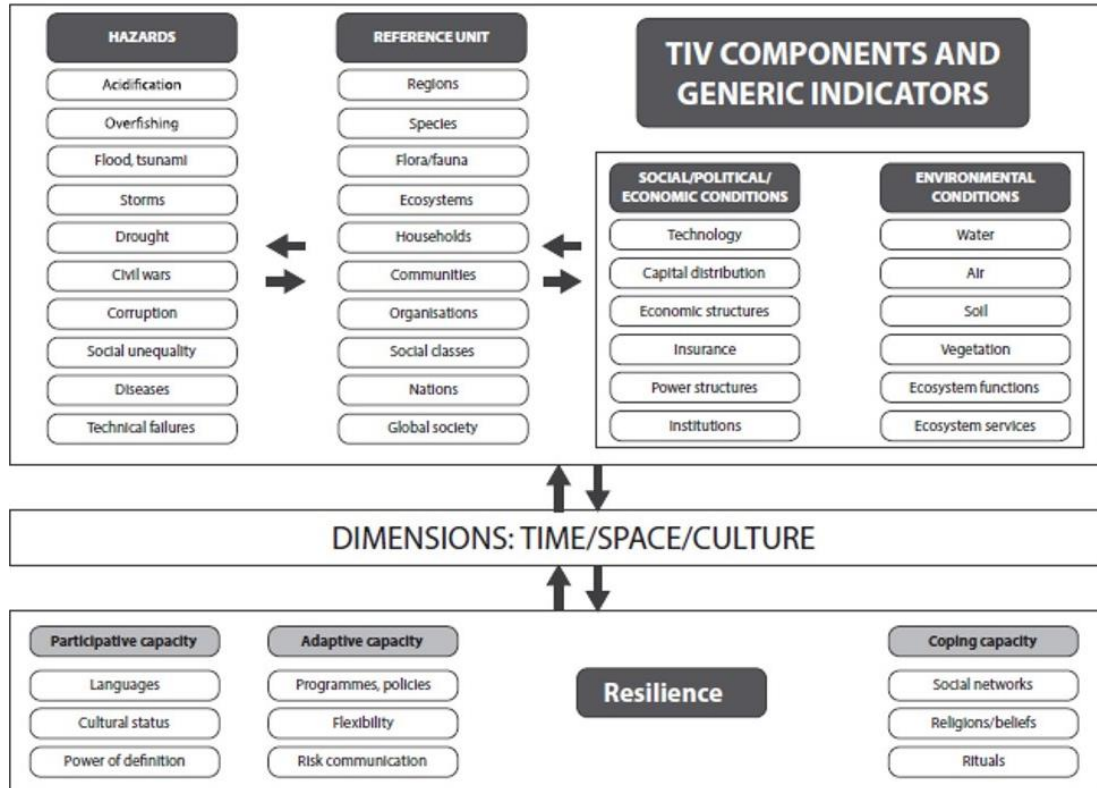
Pada Kampung Budaya Sindang Barang, struktur sosio-kulturalnya tidak jauh berbeda dengan adat Kasepuhan lainnya, namun, ada sedikit kriteria yang harus dipenuhi ketika mencalonkan dirinya untuk jabatan sosial tertentu, seperti *penengkes* (sesepuh adat) yang diharuskan merupakan orang asli keturunan Sindang Barang dan berwawasan luas mengenai kearifan lokal yang dimiliki di dalamnya. Penengkes sendiri memiliki peranan sebagai pelestari pengetahuan sejarah budaya Sindang Barang. Sementara itu, *pupuhu* (ketua adat) merupakan pemimpin dari kampung yang diharuskan memiliki nilai-nilai kepemimpinan dan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Pupuhu bertugas menjalankan mandat dan anjuran dari *penengkes*. Dua jabatan sosial ini cukup memegang peranan penting dalam melestarikan kehidupan adat di Sindang Barang (Dahlan 2009).

Kampung Budaya Sindang Barang diambil sebagai kasus kajian untuk mengungkap sejarah dan peran mandat dalam budaya mitigasi bencana. Hal ini dilakukan dengan mengamati pesan yang terkandung dalam objek arsitektur, wawancara pada narasumber relevan, dan artefak yang masih terlihat. Nilai-nilai semiotika yang terkandung dapat menjadi jejak untuk mengungkap adanya modal-modal (Bourdieu 1986) yang berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, peran mandat dapat diketahui menurut prosesnya.

Untuk mengamati hal tersebut, Voss dan Funk (2008) membuat pendekatan berupa indikator resiliensi kebencanaan (*transdisciplinary*

*integrative vulnerability-resilience approach*). Resiliensi ini bergantung pada kapasitas sebuah komunitas dalam mengatasi segala macam intervensi sebagai potensi atau tantangan (Adger 2000; Voss 2008). Modal kultural (*cultural*

*capital*), ekonomi (*economic capital*), dan sosial (*social capital*) digunakan untuk mengamati kapasitas dan proses budaya mitigasi yang dimiliki (Lihat gambar 1).



**Gambar 1.** Indikator resiliensi kebencanaan  
Sumber: (Voss 2008; Krüger et al. 2015)

Resiliensi kebencanaan dibedakan atas tiga kapasitas. Kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) merupakan tindakan mempertahankan budaya mitigasi bencana dari intervensi luar lingkup komunitas. Sebuah komunitas dianggap memiliki kapasitas adaptif ketika kelompok tersebut melakukan upaya sebagai bentuk adaptasi terhadap intervensi luar berupa tantangan atau ancaman yang berpotensi mengacaukan sistem penanggulangan kebencanaan yang telah diberlakukan sejak lama. Upaya tersebut dapat berupa proses pembelajaran terhadap sebuah tren, atau proses *trial and error*. Kapasitas preservatif (*coping capacity*) memiliki sedikit kemiripan definisi dengan kapasitas adaptif. Perbedaannya terletak pada bagaimana kapasitas preservatif dapat merumuskan suatu program atau konsep mitigasi yang ilmiah dan rasional menjadi proses mitigasi bencana yang tradisional dan kultural.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya kepercayaan, ritual, atau tradisi yang diyakini suatu komunitas dalam melakukan mitigasi bencana, namun, tradisi ini sebetulnya dapat ditelaah secara ilmiah. Kapasitas partisipatif (*participative capacity*) merupakan kapasitas yang memperlihatkan adanya upaya berdampak sosial, ekonomi, atau kultural yang terlihat pada proses beradaptasi terhadap fenomena lingkungan dan bencana alam. Kapasitas partisipatif berfungsi untuk memetakan modal-modal (*capital*) apa saja yang terlibat pada penanggulangan bencana (Adger 2000; Voss 2008).

Penelitian ini akan melihat peran mandat dalam budaya mitigasi masyarakat adat. Mandat (*credential*) dibaca dari tiga aspek kapasitas masyarakat adat dalam mitigasi, yaitu kapasitas beradaptasi, kapasitas membangun pengetahuan dan kapasitas partisipatif (Adger 2000; Voss

2008). Dari ketiga kapasitas mitigasi, mandat ditelusuri melalui pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan tata krama (*manner*) dari budaya mitigasi masyarakat adat yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan analisis *cultural studies* sebagai alat dalam mengidentifikasi adanya tradisi. Sebelumnya, pendekatan *cultural studies* untuk mengidentifikasi tradisi dilakukan oleh Putra dan Ekomadyo (2015b) untuk membaca tradisi Rumoh Aceh dengan pendekatan semiotika (Putra dan Ekomadyo 2015b). Untuk membaca budaya mitigasi Kampung Budaya Sindang Barang, penelitian ini menggunakan pendekatan modal budaya (*cultural capital*) dari Bourdieu (1986) dengan menelaah bagaimana keterampilan, pengetahuan, tata krama, dan mandat menurut kapasitas mitigasi bencana pada masyarakat adatnya (Bourdieu 1986).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menelusuri fenomena dan artefak yang ada di lapangan. Melalui pendekatan kultural berupa semiotika, tanda fisik pada sebuah artefak dapat menjadi makna dan pesan bagi pembuat. Makna dan pesan ini dikaji berdasarkan pendekatan teori dasar budaya mitigasi (indikator resiliensi kebencanaan) (Voss 2008). Pendekatan ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengamati dan menelusuri peran mandat dalam budaya mitigasi bencana.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap narasumber setempat. Observasi dilakukan selama satu hari pada tanggal 25 Oktober 2019 dari pukul 10.00-16.00 WIB. Narasumber yang berada di Kampung Budaya Sindang Barang

adalah Bapak Ukat, selaku pemandu wisatawan dan memiliki hubungan sesama masyarakat adat terhadap salah satu keluarga pendiri Kampung Budaya Sindang Barang dan mantan sesepuh adat, Alm. Etong Sumawijaya (sekarang dikelola oleh cucunya, Achmad Sumawijaya yang merupakan ketua adat hingga kini).

Analisis dilakukan melalui dua tahap, tahap pertama yang dilakukan adalah membuat tabel upaya mitigasi berdasarkan program atau artefak yang masih ada. Tahap kedua adalah membuat diskusi konsep budaya mitigasi berdasarkan kapasitasnya (Voss 2008). Dengan memaparkan kapasitas, peran mandat (*credential*) dapat terlihat pada (1) proses kulturalnya (Bourdieu 1986; Dovey 2009) dan (2) kapasitas ekonomi, sosial, atau kultural (*participative capacity*) yang diberikan pada ketahanan budaya mitigasi di Kampung Budaya Sindang Barang (Bourdieu 1986).

## Temuan dan pembahasan

Kampung Budaya Sindang Barang tergabung dalam wilayah Desa Pasir Eurih di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara geografis, situs Kampung Budaya Sindang Barang terletak pada dataran tinggi dan dibatasi oleh sawah sistem irigasi yang membentang di sekitar kawasan sebelah Utara (A), Barat (B), Timur (C), dan hutan keramat (*leuweung tutupan*) di sebelah Selatan (D) (Lihat gambar 2).



### Legenda

- A. Utara : Sawah irigasi
- B. Barat : Sawah irigasi
- C. Timur : Sawah irigasi
- D. Selatan: Hutan keramat (*leuweung tutupan*)

1. Rumah rama (*imah gede*)
2. Sekretariat (*girang serat*)
3. Rumah penengkes (*imah kokolot*)
4. Aula (*bale pangriungan*)
5. Gerai seni (*imah talu*)
6. Lumbung padi (*leuit*)
7. Rumah kepala keluarga (*imah*)

Gambar 2. Peta kawasan Kampung Budaya Sindang Barang

Kampung Budaya Sindang Barang merupakan contoh pemukiman tradisional Sunda Kasepuhan, sehingga tata ruangnya benar-benar disesuaikan menurut kaidah yang diyakini oleh leluhurnya. Latar belakang berdirinya kampung dengan konsep pelestarian budaya ini berasal dari inisiatif sesepuh adat (*penengkes*) yang melihat persoalan turunnya kepedulian terhadap nilai budaya Sunda di tengah era modernisasi. Masyarakat adat Kasepuhan meyakini adanya konsep patempatan yang berarti proses berkembangnya tempat (*locus*) secara berkala. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah komponen pemukimannya (umbalan: 1-3 rumah; babakan: 3-6 rumah; dan kampung: lebih dari 6 rumah).

Kampung Budaya Sindang Barang berada di lahan berkontur landai dengan cakupan luas sekitar 8600m<sup>2</sup> dengan rincian massa atau fasilitas: (1) rumah ketua adat (*imah gede*), (2) sekretariat (*girang seurat*), (3) dua unit rumah sesepuh adat (*imah kokolot*), (4) aula (*bale pangriungan*), (5) tempat kesenian (*imah talu*), (6) beberapa unit lumbung padi (*leuit*), dan (7) rumah penduduk (*imah*). (Gambar 2)

Fasilitas ini tidak hanya berperan sebagai fasilitas pengunjung yang datang ke Kampung Budaya Sindang Barang, tetapi juga sebagai contoh fisik perkampungan di Kampung Budaya Sindang Barang yang difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para leluhur pada masanya. Sumber daya dan ekosistem yang dipercaya sebagai kebutuhan bertahan hidup dibedakan atas tiga komponen: hutan keramat (*leuweung tutupan*), pemukiman, dan pertanian sistem irigasi (*serang*).

#### Struktur adat

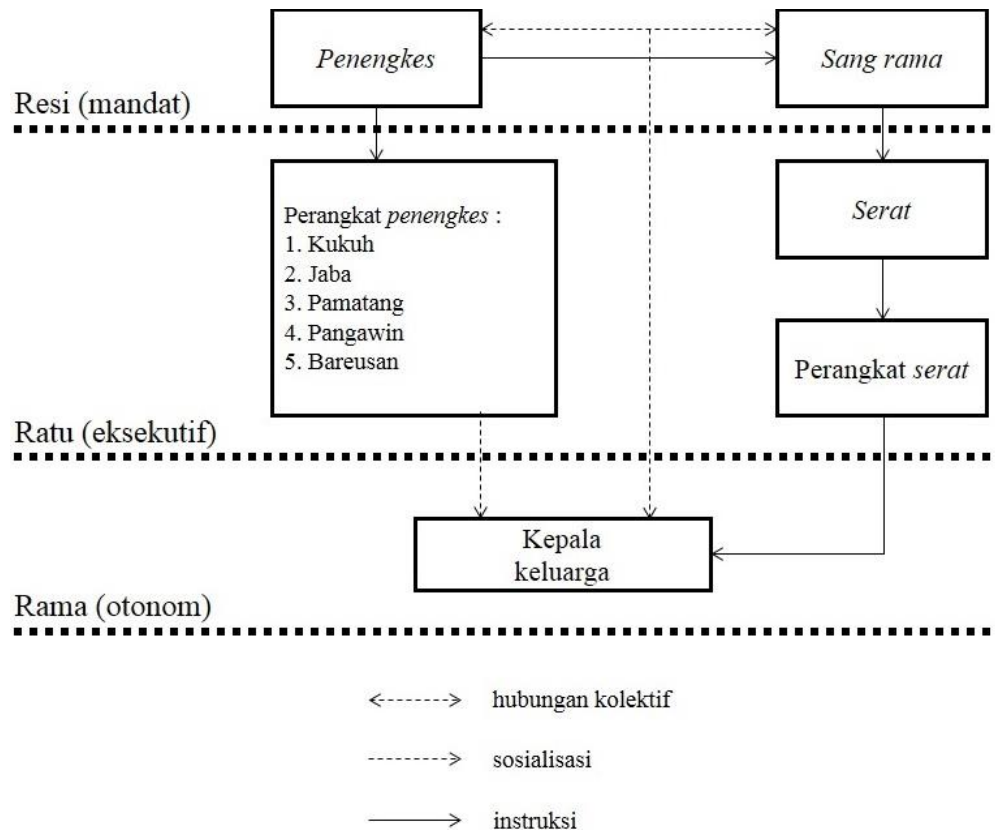
Masyarakat adat Sindang Barang memahami latar belakang kebencanaan yang diwujudkan dalam unsur arsitektur karena adanya pola *tripartit* yang dipatuhi. Pola ini berasal dari prinsip paternalisme yang diyakini leluhur bahwa manusia tidak dapat hidup seenaknya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan bencana karena prinsip” ada perbuatan maka ada

konsekuensi”. Secara garis besar pola *tripartit* menempatkan manusia, alam, dan ruh sebagai unsur-unsur dalam mempertahankan kehidupan yang saling berkaitan menurut peran dan batasannya.

Pola *tripartit* menjadi pondasi dalam merumuskan beberapa batasan yang terangkum dalam sebuah program atau mandat di antaranya: (1) *lemah-cai*, dijelaskan sebagai pemukiman manusia yang membutuhkan tanah dan air, (2) *luhur-handap*, dijelaskan sebagai hubungan kultural manusia-manusia dan manusia-Tuhan, dan (3) *kaca-kaca*, dijelaskan sebagai kehidupan manusia yang tidak boleh liar dalam kebebasan, sehingga perlu diberikan batasan berupa aturan.

Pola *tripartit* juga diterapkan dalam mengatur hubungan antar pengurus adat. Pola *tripartit* ditranslasikan ke dalam tiga unsur penting pengurus adat, antara lain (1) *resi* sebagai pemegang mandat. Pada masanya dipegang oleh struktur dalam kampung adat dan berperan sebagai pembentuk kampung lainnya, (2) *ratu* sebagai pelaksana, pada masanya dipegang oleh kampung nagara dan berperan sebagai lembaga eksekutif, dan (3) *rama* sebagai pelaksana otonom, pada masanya dipegang oleh kampung tani dan berperan sebagai lembaga pengelola sumber makanan.

Sejak era modernisasi bentuk pemerintahan, ketiga unsur sistem tersebut melebur di dalam kampung adat dan hanya mengatur apa yang berlaku di dalam kampung adat tersebut. Pengurus adat yang terdiri atas *penengkes* sebagai ketua adat dan sang rama sebagai ketua adat bersifat sebagai *resi* yang dipercaya dalam memegang kendali mandat. Perangkat pembantu dari masing-masing ketua dan tetua adat bersifat sebagai *ratu* yang berperan melaksanakan mandat tersebut dalam bentuk sosialisasi atau instruksi. Arahan tersebut diterima oleh para kepala keluarga yang bersifat sebagai *rama* untuk diterapkan dalam lingkungan internal keluarganya (Lihat gambar 3).



**Gambar 3.** Struktur jabatan ketua adat (*sang rama*) dan tetua adat (*penengkes*)

Masyarakat adat meyakini adanya peran instruktur dalam memberi mandat, namun mereka tidak menerapkan prinsip otoriter dalam kesehariannya. Dalam pantun Sunda dijelaskan bahwa “yang berkuasa tidak memiliki, namun yang memiliki tidak berkuasa”. Sehingga dalam penerapannya, hubungan struktur adat bersifat kolektif (Lihat gambar 3). Instruksi yang dipercayakan kepada para pengurus adat hanya bersifat sebagai pedoman hidup yang harus diteruskan dari generasi ke generasi, namun dalam penerapannya, setiap orang tetap memegang teguh tujuan hidup bersama.

Dari gambar 3, *penengkes* dan *sang rama* memiliki kedudukan setara. Hubungan instruksi yang terjadi hanya sebatas penyaluran mandat

yang kemudian diteruskan ke serat dan perangkatnya hingga sampai kepada kepala keluarga. Di samping itu, hubungan sosialisasi juga diberikan dari *penengkes* kepada kepala keluarga melalui perangkat *penengkes*. Pada bagan struktur pada gambar 3 ditunjukkan hubungan dua arah yang bersifat kolektif masih dapat dilakukan dari ketiga unsur ini.

Berdasarkan observasi di lapangan dan studi literatur, ada beberapa artefak dan konsep yang terlihat di Kampung Budaya Sindang Barang berdasarkan kategori bencananya, di antaranya ada pada tatanan (risiko tanah longsor), *pawon*, *sawung leuit* (risiko kebakaran), sistem bangunan, dan orientasi (risiko gempa) (Lihat tabel 1).

**Tabel 1.** Beberapa konsep dan artefak sebagai upaya mitigasi terhadap risiko bencana

Mitigasi bencana	Konsep atau program	Ilustrasi
Risiko tanah longsor	<b>Tatanan</b> Menjaga ekosistem hutan keramat sebagai <i>buffer</i> longornya tanah untuk area pemukiman	<p>hutan keramat (<i>leuweung ratapan</i>) diletakkan di kontur yang lebih tinggi dari pemukiman sebagai <i>buffer</i> apabila terjadi longsor</p>

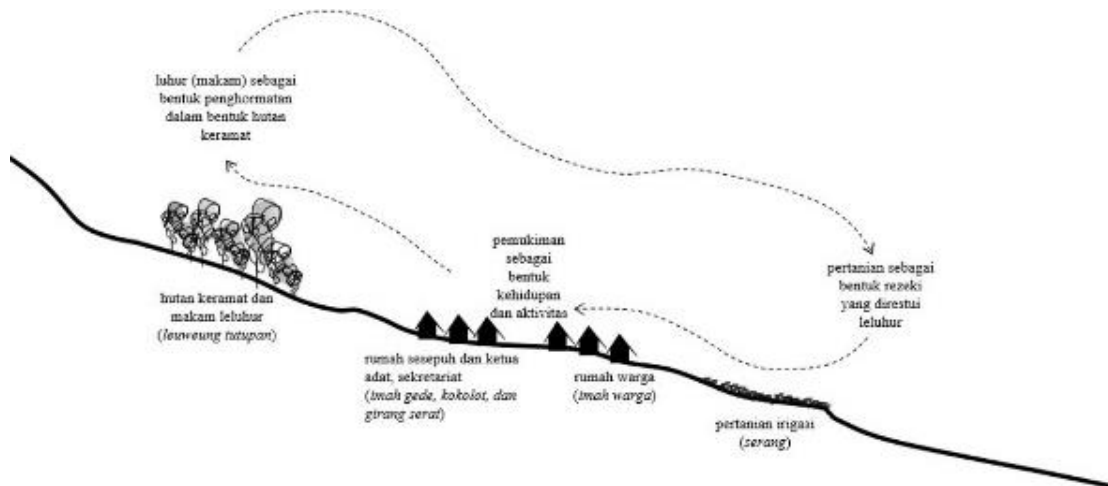
Mitigasi bencana	Konsep atau program	Ilustrasi
Risiko kebakaran	<p><b>Pawon</b> Membuat <i>hawu</i> dan <i>parako</i>. Alat ini adalah wadah berbentuk bidang segiempat dengan bahan tanah liat yang ditumpuk dengan abu</p>	
	<p><b>Sawung leuit</b> Membuat bangunan lumbung padi terpisah dari area rumah untuk mencegah penyebaran api</p>	
Risiko gempa	<p><b>Sistem bangunan</b> Konsep rumah panggung, pondasi umpak dan atap ijuk</p>	
	<p><b>Orientasi</b> Membuat orientasi bangunan menghadap ke pekarangan yang juga dipakai sebagai titik kumpul masyarakat</p>	

#### Risiko tanah longsor: Tatanan

Struktur tanah di Kampung Budaya Sindang Barang dapat dikatakan cukup aktif karena seringkali mengalami tanah longsor. Jenis tanah yang berada di Kampung Budaya Sindang Barang umumnya didominasi oleh latosol berpasir yang memungkinkan terjadinya longsor di tanah berkontur. Jenis tanah ini banyak dijumpai di area hutan keramat (*leuweung tutupan*) dan pertanian (*serang*). Leluhur adat Sindang Barang mempelajari fenomena tanah longsor secara natural berdasarkan pengalaman. Hutan tidak seharusnya dikonsumsi sebebannya sebagai kebutuhan bahan bangunan. Seiring berjalannya waktu, kesadaran bahwa menghargai dan mengelola alam merupakan perilaku yang akan memberikan efek baik. Pemikiran ini dikembangkan berdasarkan logika *tripartit* bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam dan ruh yang memiliki kehendaknya masing-masing tergantung dari perbuatan. Hal ini yang menjadi cikal bakal pengelompokan antara hutan yang dapat dikonsumsi dan hutan yang mampu menahan struktur tanah lemah. Semenjak hutan dikelola dengan baik, tanah yang meluruh tidak menyebabkan risiko bencana yang menelan korban.

Keyakinan bahwa leluhur punya andil dalam menjaga anak cucunya juga menjadi pertimbangan masyarakat adat Sindang Barang dalam menempatkan kompleks makam leluhur di area hutan keramat (*leuweung tutupan*). Melalui prinsip ini, status leluhur ditinggikan dan dihargai oleh masyarakatnya. Dengan menghargai adanya peran leluhur dan ruh melalui panjatan doa, masyarakat adat mempercayai efek tersebut akan menjauhkan siapa saja yang berperilaku baik dari bencana longsor. Sementara itu, melalui perbuatan baik dalam mengelola alam, mereka percaya bahwa sumber makanan dan air yang melimpah akan datang.

Pemikiran ini disempurnakan menjadi konsep luhur-handap sebagai tatanan pemukiman di kawasan berkontur (Lihat [gambar 4](#)). Konsep luhur-handap terlihat pada Kampung Budaya Sindang Barang yang menempatkan wilayah pemukiman berada di antara hutan keramat (*leuweung tutupan*) pada kontur tertinggi dan sawah (*serang*) pada kontur terendah. Seperti ditunjukkan pada [gambar 4](#), pola tripartit terlihat dari bagaimana masyarakat adat membagi unsur-unsur kehidupan atas tiga kelompok penting yang saling mendukung berdasarkan perilakunya.



**Gambar 4.** Ilustrasi konsep *luhur-handap* tatanan pemukiman masyarakat adat Sindang Barang

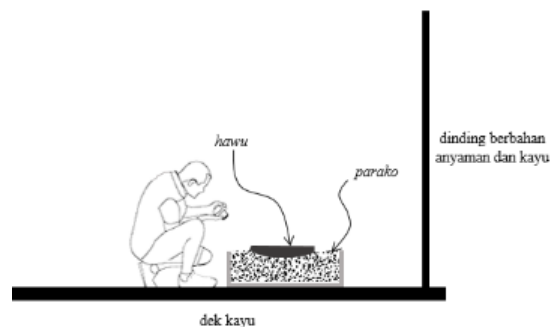
Risiko kebakaran: *Pawon* dan *sawung leuwit*

Masyarakat Sindang Barang tidak memiliki banyak aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan api. Namun, masyarakat adat mengusahakan sejumlah upaya tertentu berupa alat bantu dalam mengatasi risiko kebakaran. Pada masanya, karakter material bangunan adat di Sindang Barang didominasi oleh kayu, ijuk, dan anyaman bambu. Material semacam ini disadari cukup rentan terhadap kebakaran dan proses penyebarannya cepat.

Mengetahui hal tersebut, leluhur masyarakat adat menemukan bahwa material tanah liat dan batuan alam dapat menahan api untuk memasak. Berdasarkan observasi lapangan, terdapat artefak berupa *hawu* dan *parako* sebagai alat memasak di dapur (*pawon*). (Lihat [gambar 5a](#)) Alat-alat ini berfungsi sebagai pelindung material bangunan di dapur dari api yang dihasilkan untuk memasak. *Hawu* merupakan wadah berbahan batu-batuan alam yang dipahat sebagai alas wajan untuk memasak, sementara *parako* merupakan wadah bidang segiempat yang berisi abu dan tanah liat. Seperti ditunjukkan pada [gambar 5a](#), penggunaan alat masak ini dilakukan dengan meletakkan *parako* di bagian terbawah sebagai tungku. Abu pada *parako* berfungsi melindungi alas kayu atau bambu. Sementara itu, *hawu* diletakkan di atas *parako* untuk memasak atau memanaskan makanan.

Upaya mengatasi risiko kebakaran juga tampak pada penyimpanan hasil panen pada lumbung padi (*sawung leuit*) (Lihat [gambar 5b](#)). Leluhur adat menilai hasil panen sebagai rejeki perlu diberikan perlakuan yang pantas. Dengan adanya lumbung padi yang dibangun terpisah dari

bangunan hunian seperti ditunjukkan pada [gambar 5b](#), risiko penularan api akan berkurang dan pengelolaan hasil panen juga menjadi mudah.







**Gambar 5.** a) *Hawu* dan *parako* sebagai artefak alat masak di dapur (*pawon*), (b) lumbung padi (*leuit*) sebagai tempat menyimpan hasil panen

Risiko gempa: Sistem bangunan dan orientasi

Masyarakat adat Kasepuhan di Jawa Barat umumnya mengenali karakteristik gempa yang berada pada lahan pemukimannya. Sejak lama, leluhur mengamati aktivitas struktur tanah yang dapat berakibat fatal terhadap bangunan yang dihuni masyarakatnya. Leluhur memahami bahwa membuat sistem bangunan yang kaku (*rigid*) dapat memberikan dampak yang cukup berisiko ketika gempa terjadi. Oleh karena hal tersebut, konsep bangunan adat Sunda selalu menerapkan sistem bangunan dengan material yang ringan dan tidak kaku.

Pada Kampung Budaya Sindang Barang, model struktur massa bangunan didirikan dengan pondasi umpak dengan timbunan pasir. Sementara itu, material ringan pada penutup atap juga ditunjukkan dengan penggunaan atap berbahan ijuk yang bertujuan untuk memberikan fungsi naungan yang maksimal tanpa harus membebani struktur massa (Lihat [gambar 6](#)). Seperti ditunjukkan pada [gambar 6](#), konsep ini tetap mengacu kepada pola *tripartit* dengan membagi tatanan massa bangunan atas tiga kelompok, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah, yang akhirnya dirumuskan menjadi konsep *luhur-handap*.

Ketika berkaitan dengan keselamatan, pondasi umpak pada bagian bawah (*handap*) berperan penting dalam menahan bangunan agar tidak mudah runtuh. Alas bangunan dan tapak yang hanya bersentuhan secara titik lokal (tidak menyeluruh) menjadi usaha leluhur adat untuk tidak memberikan banyak perubahan terhadap alam sebagai perilaku menghargai alam. Ruang hampa pada bagian bawah bangunan yang menghasilkan bentuk rumah panggung dipercaya sebagai ruang tinggal bagi ruh-ruh bencana gempa (Lihat [gambar 6](#)). Atap pada bagian atas

(*luhur*) yang berperan sebagai naungan juga memerlukan material pengisi yang ringan. Atap ringan berupa ijuk dianggap oleh leluhur sebagai tindakan yang didasari oleh petuah “pantang menggunakan atap tanah liat, karena seperti membuat kuburan bagi orang hidup”. Seperti ditunjukkan pada [gambar 6](#), ruang hampa pada atap diyakini merupakan ruang bagi para leluhur sebagai bentuk penghormatan bagi manusia yang tinggal di tengah.



**Gambar 6.** Konsep *luhur-handap* sebagai upaya mitigasi gempa pada bangunan

Mitigasi yang berkaitan dengan risiko gempa juga tampak dari pertimbangan bagaimana titik kumpul (*assembly point*) bagi masyarakat untuk evakuasi ketika hunian atau naungan tidak dapat menahan kekuatan gempa. Leluhur adat yang memahami bahwa lingkungannya rentan terhadap risiko gempa memikirkan bagaimana seharusnya tatanan permukiman akan mempengaruhi akses bagi masyarakatnya untuk melakukan evakuasi. Pantun Sunda yang menyebutkan bahwa “yang berkuasa tidak memiliki, namun yang memiliki tidak berkuasa”. Ungkapan ini

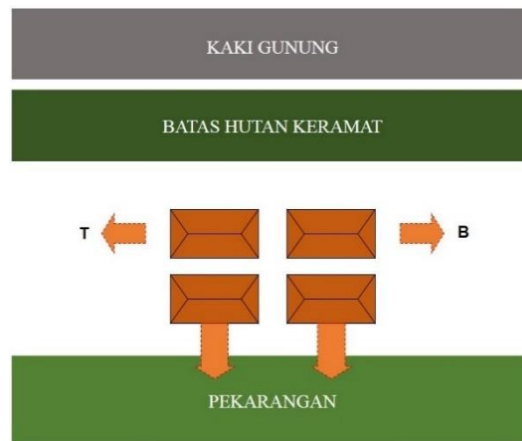
juga berarti bahwa masyarakat adat harus hidup berdampingan dengan yang lain tanpa adanya sekat derajat yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama ketika mengalami musibah.

Leluhur adat menetapkan bagi setiap orientasi bangunan harus menghadap pekarangan (*buruan*) yang berperan sebagai pembatas wilayah dan juga sebagai titik kumpul (Lihat gambar 7). Dengan menyediakan pekarangan di tengah kawasan permukiman seperti ditunjukkan pada gambar 7, evakuasi ketika gempa menjadi mudah untuk dilakukan bagi masyarakat. Leluhur adat juga membuat alternatif bagi massa bangunan jika orientasi menuju pekarangan terhalang oleh bangunan lain untuk membuat orientasi bangunan dapat menghadap sisi timur atau barat, sehingga pertimbangan evakuasi masih bisa tetap dioptimalkan. Pemikiran ini ditetapkan menjadi konsep *kaca-kaca* yang membahas mengenai batasan manusia dalam hidup teratur berdampingan dengan yang lain.

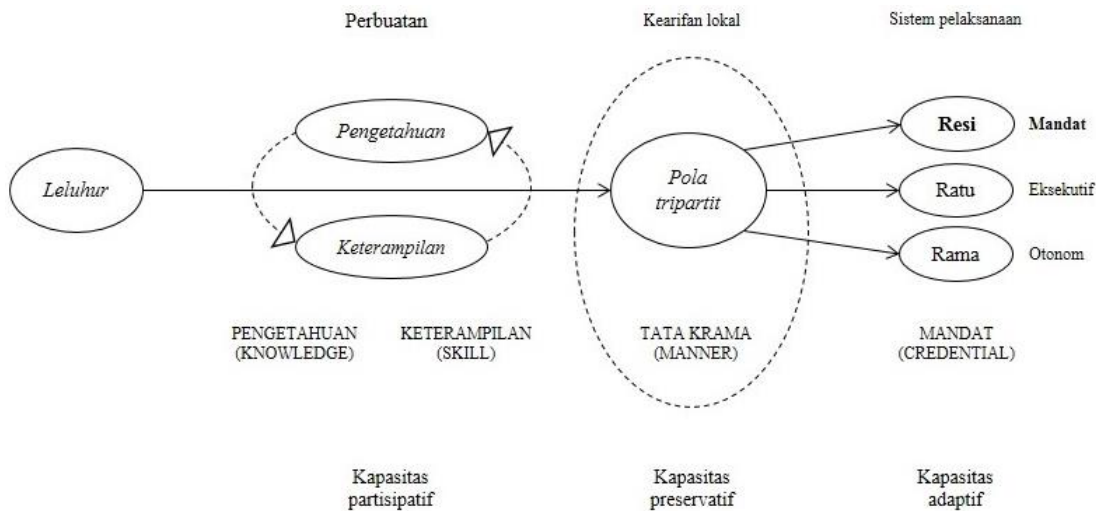
Posisi mandat (*credential*) dalam mitigasi

Mandat (*credential*) yang dipegang oleh *penengkes* dan *sang rama* berperan sebagai kapasitas adaptif pada Kampung Budaya Sindang Barang (Lihat gambar 8). Setiap budaya mitigasi bencana pada kelompok masyarakat adat akan selalu berhadapan dengan perubahan jaman. Perubahan jaman sebagai potensi dan tantangan berkaitan dengan bagaimana mandat (*credential*) dari struktur adat dalam mengatasinya. Perubahan

jaman yang ditunjukkan dengan meleburnya kawasan kampung adat, nagara, dan tani tidak menjadikan mandat (*credential*) lenyap begitu saja. Mandat yang sudah ditetapkan sejak lama mengalami adaptasi terhadap mengecilnya kawasan kampung adat Sindang Barang. Pantangan atau batasan tetap dapat diberlakukan walaupun ruang lingkup pemerintahannya menjadi lebih kecil. Seperti ditunjukkan pada gambar 8, proses kultural yang dilakukan masyarakat adat Sindang Barang berawal dari pengamatan dan pengalaman leluhur adat dalam mengatasi bencana.



Gambar 7. Konsep *kaca-kaca* dalam mengatur orientasi bangunan



Gambar 8. Diagram proses kultural dalam mitigasi bencana

Berdasarkan literatur dari Voss dan Funk (2008), adanya kapasitas adaptif menunjukkan kualitas sebuah kelompok dalam menyediakan program manajemen risiko bencana. Kapasitas adaptif dalam bentuk mandat ini didasari oleh adanya tata krama (*manner*) yang bersifat sakral. Hal ini diperlihatkan seperti pada gambar 8 pada bagaimana pola tripartit berperan sebagai pedoman dalam membentuk konsep-konsep yang sakral. Konsep-konsep seperti luhur-handap atau *kaca-kaca* yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk kapasitas preservatif yang menunjukkan adanya kemampuan sebuah kelompok dalam mentranslasikan program

menjadi suatu kepercayaan dalam melaksanakan ritual yang dapat berbuah menjadi rutinitas tanpa perlu mengetahui latar belakang dan tujuannya.

Dalam menciptakan proses pembelajaran, hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana budaya lokal dapat mengembangkan peradaban ([Supraptiningrum and Agustini 2015](#)). Melalui pemetaan proses kultural, modal kultural dan nonkultural, serta kelompok kapasitasnya berdasarkan telaah *cultural studies*, peran dan potensi mandat dalam penanggulangan bencana pada kampung budaya Sindang Barang dapat dicermati secara jelas sebagaimana dijelaskan menurut [tabel 2](#).

**Tabel 2.** Indikator resiliensi kebencanaan pada kampung budaya Sindang Barang

Indikator	Kapasitas partisipatif			Kapasitas preservatif	Kapasitas adaptif
Proses	Pengetahuan ( <i>knowledge</i> )	Keterampilan ( <i>skill</i> )	Proses perumusan pola tripartit	Tata krama ( <i>manner</i> )	Mandat ( <i>credential</i> )
Tatanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pentingnya hidup menghargai alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengelola makam</li> <li>• mengelola hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• status leluhur ditinggikan</li> <li>• menghormati keberadaan alam</li> </ul>	konsep <i>luhur-handap</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hukum dan pantangan kegiatan pada area makam</li> <li>• larangan menebang pohon</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sadar bahwa bangunan rentan terhadap api</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat alat masak (<i>hawu</i> dan <i>parako</i>)</li> </ul>			
Kultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil panen tidak bisa diletakkan di dapur yang berisiko api</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat <i>sawung leuit</i></li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memahami bahaya gempa merusak bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat pondasi umpak</li> <li>• membuat bahan bangunan dari material ringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• status leluhur ditinggikan</li> <li>• meyakini adanya ruh bencana</li> </ul>	konsep <i>luhur-handap</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bangunan harus berupa panggung</li> <li>• pantangan memakai atap genteng (tanah liat)</li> </ul>
Orientasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pentingnya evakuasi darurat saat gempa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan sarana keselamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kebersamaan dalam hidup berkelompok</li> </ul>	konsep <i>kaca-kaca</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bangunan harus menghadap pekarangan</li> <li>• alternatif orientasi timur-barat</li> </ul>
Nonkultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kesadaran peduli alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ketahanan pangan</li> <li>• ketahanan naungan</li> <li>• keselamatan</li> <li>• pengelolaan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apresiasi</li> </ul>		

Modal (*capital*) ([Bourdieu 1986](#); [Dovey 2009](#)) dan kapasitas (*capacities*) ([Voss 2008](#);

[Krüger et al. 2015](#)) merupakan komponen penyusun budaya mitigasi. Komponen penyusun

budaya mitigasi ini dikemukakan melalui empat proses kultural (Dovey 2009) untuk mengamati kearifan lokal yang muncul ketika mengatasi bencana alam. Proses kultural diurutkan berdasarkan telaah *cultural studies* yang sudah dilakukan. Proses kultural dan kapasitas pada indikator resiliensi bencana memiliki kesamaan menurut langkah pembentukan budayanya. Berdasarkan tabel 2, proses kultural (Dovey 2009) yang dilakukan leluhur adat Sindang Barang dalam membentuk penanggulangan bencana diurutkan atas tahap (1) akumulasi pengetahuan (*knowledge*), (2) membentuk keterampilan (*skill*), (3) mencipta tata krama menurut pola *tripartit* (*manner*), dan (4) menentukan mandat (*credential*).

Indikator resiliensi bencana (Voss 2008; Krüger et al. 2015) yang muncul pada proses akumulasi pengetahuan dan pembentukan keterampilan sepadan dengan kapasitas partisipatif karena dari proses-proses ini muncul banyak manfaat/modal kultural dan sosial-ekonominya (*nonkultural*). Modal kultural (*cultural capital*) menjadi pemicu bagi modal ekonomi-sosial dan berlaku sebaliknya (Bourdieu 1986; Dovey 2009). Modal-modal ini menjadi nilai yang dimanfaatkan dalam mengukur peluang dan ancaman bagi suatu komunitas dalam menjawab tantangan modernisasi. Modal-modal ini memiliki potensi sebagai komponen daya saing masyarakat di masa mendatang (Putra dan Ekomadyo 2015a; 2015b)

Sementara itu, proses mencipta tata krama sepadan dengan kapasitas preservatif karena tahap ini cenderung mengarah kepada kemampuan mentranslasi sebuah skema menjadi konsep yang sakral seperti *luhur-handap* atau *kaca-kaca* berdasarkan pola *tripartit*. Namun seperti ditunjukkan pada tabel 2, peran pola *tripartit* berada di antara proses kultural keterampilan (*skill*) dan tata krama (*manner*).

Proses menentukan mandat sepadan dengan kapasitas adaptif karena tahap ini cenderung mengarah kepada pantangan atau perintah dalam sebuah program yang diselenggarakan secara sistematis pada konteks tertentu. Kapasitas adaptif ditunjukkan oleh Kampung Budaya Sindang Barang dari masa ke masa sebagai bentuk pelestarian esensi kearifan lokal, termasuk yang berkaitan dengan kebencanaan. Pada masa kejayaan Kampung Adat Sindang Barang, mandat dari kampung adat mencakup setiap Kampung Nagara, dan Kampung Tani. Seiring modernisasi berkembang, cakupan mandat tersebut

disesuaikan secara adaptif menjadi hanya sebatas lingkungan kampung adat Sindang Barang. Kini, mandat tersebut sudah tidak dilestarikan kembali, namun tindakan adaptif yang diambil oleh para tetua adat adalah dengan membuat kampung adat tersebut menjadi Kampung Budaya Sindang Barang sebagai objek wisata. Hal ini ditujukan sebagai upaya dalam mempertahankan eksistensi kampung tersebut walaupun dampaknya tidak signifikan.

## Kesimpulan

Penanggulangan kebencanaan berperan penting dalam menjamin keselamatan manusia dari waktu ke waktu. Modernisasi dapat mempengaruhi eksistensi budaya mitigasi yang telah dipelihara sejak lama. Kampung Budaya Sindang Barang dibentuk sebagai bentuk rekonsiliasi terhadap modernisasi yang menyebabkan tergerusnya kepedulian terhadap nilai leluhur, termasuk budaya mitigasi bencana.

Mandat (*credential*) yang tergabung dalam proses kultural menjadi kunci sebuah sistem yang dapat menciptakan resiliensi terhadap bencana serta upaya pelestariannya, walaupun dampaknya tidak signifikan. Tindakan adaptif yang diwakili dalam sebuah mandat dalam masyarakat adat Sindang Barang sebagai kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi masyarakat adat dalam melestarikan adanya esensi nilai kearifan lokal, termasuk mitigasi bencana.

Pengembangan Kampung Budaya Sindang Barang saat ini mengarah kepada industri pariwisata dengan intervensi pemerintah setempat. Tantangan yang dihadapi adalah menyelamatkan eksistensi nilai leluhur yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Penelitian dengan pendekatan ekonomi masyarakat dan ilmu pariwisata dapat menjadi peluang untuk meneruskan peninggalan nilai mitigasi kebencanaan sebagai bekal pengetahuan bagi masyarakat setempat.

## Referensi

- Adger, W. Neil. 2000. "Social and ecological resilience: Are they related?" *Progress in Human Geography*.

- <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>.
- Birkmann, Joern, Denis Chang Seng, dan Neysa Setiadi. 2013. "Enhancing early warning in the light of migration and environmental shocks." *Environmental Science and Policy* 27 (1): S76–88. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.04.002>.
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Form of Capital, in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education." *Greenwood Press*. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>.
- Dahlan, Mohammad Zaini. 2009. "Perencanaan lanskap kawasan wisata budaya di kampung budaya Sindang Barang, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor (pendekatan community based planning)." Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/44815>.
- Dovey, Kim. 2009. *Becoming Places: Urbanism/Architecture/Identity/Power*. 1 ed. United Kingdom: Routledge, Taylor and Francis Group.
- Harun, Ismet Belgawan. 2011. "Arsitektur Rumah dan Pemukiman Tradisional di Jawa Barat." In Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Krüger, Fred, Greg Bankoff, Terry Cannon, Benedikt Orłowski, dan E. Lisa F. Schipper. 2015. *Cultures and Disasters: Understanding Cultural Framings in Disaster Risk Reduction*. *Routledge Studies in Hazards, Disaster Risk and Climate Change*. 1 ed. United Kingdom: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315797809>.
- Lake, Reginaldo Christophori. 2015. "Budaya Tektonika Wologai Ende, Nusa Tenggara Timur Sebuah Seni Berkonstruksi Rumah Adat Desa Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Warisan Leluhur Wawo - Ata Lio di Bawah Kaki Gunung Lepembusu." *ATRIUM: Jurnal Arsitektur* 1 (2): 151–66. <https://doi.org/10.21460/atvm.2016.12.15>.
- Lake, Reginaldo Christophori, Benediktus Boli, Ubaldu Djonda, dan Yohanes Nurak Siwa. 2018. "Building Task Concepts of the Vernacular Settlement in Tamkesi Village." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/213/1/012034>.
- Madiasworo, Taufan. 2009. "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kampung Melayu Semarang." *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 1 (1): 10–18. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/lw/article/view/1360/867>.
- Maryani, Enok, dan Ahmad Yani. 2014. "Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Memitigasi Bencana dan Aplikasinya sebagai Sumber Pembelajaran IPS berbasis Nilai." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14 (2): 114–25. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3111/2132>.
- Permana, Raden Cecep Eka, Isman Pratama Nasution, dan Jajang Gunawijaya. 2011. "Kearifan Lokal tentang Mitigasi Bencana pada Masyarakat Baduy." *Makara Human Behavior Studies in Asia*. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.954>.
- Putra, Riza Aulia, dan Agus S. Ekomadyo. 2015a. "Interpretasi Makna pada Warung Kopi Aceh, Studi Kasus: Warung Kopi Solong di Banda Aceh." *Atrium: Jurnal Arsitektur* 1 (1): 1–10. <https://doi.org/10.21460/atvm.2015.11.1>.
- . 2015b. "Penguraian Tanda (Decoding) pada Rumoh Aceh dengan Pendekatan Semiotika." *Tesa Arsitektur* 13 (1): 1–14. <https://doi.org/10.24167/TES.V13I1.354>.
- Sabri, Hala M. 2004. "Socio-cultural values and organizational culture." *Journal of Transnational Management Development* 9 (2–3): 123–45. [https://doi.org/10.1300/J130v09n02\\_07](https://doi.org/10.1300/J130v09n02_07).
- Salura, Purnama, dan Reginaldo Christophori Lake. 2014. "The architectural language of inner and outer space as observed among the Atoni tribe in the Tamkesi kampung on Timor Island." *International Journal of Academic Research* 6 (3). <https://doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-3/a.29>.
- Suparmini, Suparmini, Sriadi Setyawati, dan Dyah Respati Suryo Sumunar. 2014. "Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy." *Jurnal Penelitian Humaniora* 19 (1): 47–64. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3511/2995>.
- Supraptiningrum, and Agustini. 2015. 'Membangun Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah Di Sekolah Dasar'. *Jurnal Pendidikan*

- Karakter 5 (2): 219–28.  
<https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.8625>.
- Swartz, David. 1998. *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Social Forces*. Chicago: University of Chicago Press.  
<https://doi.org/10.2307/3005998>.
- Thomalla, Frank, Rebecca Smith, dan E Schipper. 2015. “Cultural Aspects of Risk to Environmental Changes and Hazards: A Review of Perspectives.” In *Disaster’s Impact on Livelihood and Cultural Survival*, diedit oleh Michelle Companion. United States: CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b18233-3>.
- Voss, Martin. 2008. “The vulnerable can’t speak. An integrative vulnerability approach to disaster and climate change research.” *Behemoth. A Journal on Civilisation* 1 (3): 39–56.  
<https://doi.org/10.6094/behemoth.2008.1.3.730>.